



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 758 Tahun 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, PPID pada SKPD/UKPD berwenang untuk menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Daftar Informasi Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
  12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);
  13. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional

- Prosedur (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 24);
14. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
  15. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
  16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
  17. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1092 Tahun 2020 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Pendapatan Daerah;
  18. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1680 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA** : Untuk mendukung berjalannya penyediaan informasi publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, PPID dibantu Bidang/Suku Badan/Unit Pelayanan dalam pengelolaan informasi, dokumentasi arsip atau pelayanan informasi sesuai lingkup tugasnya.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,



LUSIANA HERAWATI  
NIP 196706131988032002

Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administratif
8. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan
10. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA

NOMOR **758** TAHUN **2024**

TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPAMAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
<b>A. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>								
1.	Informasi Tentang Badan Publik	Berisi tentang Gambaran Profil Badan Publik Secara Umum	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_.pdf)	Selama Beraku	<a href="https://bapenda.jakarta.go.id/">https://bapenda.jakarta.go.id/</a>
2.	Informasi Program Kerja dan Kegiatan	Memuat informasi mengenai program dan kegiatan utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_.pdf)	Selama Beraku	<a href="https://bapenda.jakarta.go.id/">https://bapenda.jakarta.go.id/</a>

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
3.	Laporan Akuntabilitas Kinerja	Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memuat informasi mengenai 1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File .pdf)	Selama Berlaku	<a href="https://bapenda.jakarta.go.id/">https://bapenda.jakarta.go.id/</a>
4.	Informasi Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit	Memuat informasi mengenai Neraca, CALK, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aset	PPID Provinsi	PPID Provinsi	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File .pdf)	Selama Berlaku	<a href="https://bapenda.jakarta.go.id/">https://bapenda.jakarta.go.id/</a>
5.	Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Menyajikan informasi mengenai Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File .pdf)	Selama Berlaku	<a href="https://bapenda.jakarta.go.id/">https://bapenda.jakarta.go.id/</a>
6.	Pengadaan Barang Jasa	Informasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File .pdf)	Selama Berlaku	<a href="https://bapenda.jakarta.go.id/">https://bapenda.jakarta.go.id/</a>

**B. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA SERTA**

(TIDAK ADA)

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPAMAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
<b>C. INFORMASI WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT</b>								
1.	Daftar Informasi Publik Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Bertis tentang informasi-informasi publik yang tersedia secara berkala, serta meta, setiap saat yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File .pdf)	Selama Berlaku	<a href="https://bapenda.jakarta.go.id/">https://bapenda.jakarta.go.id/</a>
2.	Dokumen Peraturan, Keputusan, dan/ atau Kebijakan yang Telah Ditetapkan Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Memuat informasi mengenai dokumen peraturan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah di tetapkan/disahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File .pdf)	Selama Berlaku	<a href="https://djh.jakarta.go.id">https://djh.jakarta.go.id</a> <a href="https://bapenda.jakarta.go.id/">https://bapenda.jakarta.go.id/</a>
3.	Informasi Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File .pdf)	Selama Berlaku	<a href="https://apbd.jakarta.go.id/landingpage/doc">https://apbd.jakarta.go.id/landingpage/doc</a>
4.	Ringkasan Perjanjian Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga	Menyajikan dokumen surat-surat perjanjian kerjasama Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	PPID Provinsi	PPID Provinsi	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File .pdf)	Selama Berlaku	<a href="https://djh.jakarta.go.id">https://djh.jakarta.go.id</a>
5.	Informasi mengenai Prosedur Pelayanan Publik di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Menyajikan semua prosedur perizinan dalam pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File .pdf)	Selama Berlaku	<a href="https://bapenda.jakarta.go.id/">https://bapenda.jakarta.go.id/</a>

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUJASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
6.	Informasi Laporan Pelayanan Informasi Publik	Memuat informasi mengenai: 1. Jumlah Permohonan Informasi publik yang diterima; 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik; 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak, dan; 4. Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_.pdf)	Selama Beraku	<a href="https://bapenda.jakarta.go.id/">https://bapenda.jakarta.go.id/</a>
7.	Informasi mengenai siaran pers dan keterangan pers	Menyajikan informasi mengenai seluruh keterangan dan siaran pers di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	PPID Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_.pdf)	Selama Beraku	<a href="https://bapenda.jakarta.go.id/">https://bapenda.jakarta.go.id/</a>


  
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 PROVINSI DKI JAKARTA,  
 LISIANA HERAWATI  
 NIP. 196706131988032002